

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, I F, Samaji I, Kusnadi R., 2015, Aplikasi Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web di Dinas Pendapatan Daerah Bekasi, Bekasi, Jakarta
- Casavera, 2009, *Perpajakan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dewi, L, 2016, Aplikasi Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, STMIK AKAKOM, Yogyakarta.
- Jayinudin, 2012, Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kantor Kecamatan Cileunyi, Cileunyi, Bandung.
- Kadir, A, 2011, *Buku Pintar jQuery dan PHP*, Penerbit MediaKom, Yogyakarta.
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 535 Tahun 2016 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Kota Yogyakarta Tahun 2017.
- Lubis, S N, 2016, Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Dan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011, tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2010, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2014, tentang Tata Cara Penilaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2012, tentang Fungsi, Rincian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016, tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Putra, W, 2015, aplikasi Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang, Telkom University, Bandung.
- Resmi, S, 2016, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, S, 2013, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) besarnya NJOPTKP ditentukan paling rendah adalah Rp. 10.000.000,00 dan penetapannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut daerah (Pajak Daerah)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan termasuk dalam pajak daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- Website Pemerintahan Kota Yogyakarta, <http://www.jogjakota.go.id/>*  
(diakses April 2017)